



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	26 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Puluhan Tanah Wakaf Terdampak Tol Serang-Panimbang

SERANG, (KB).-

Sebanyak 74 bidang tanah wakaf di Kabupaten Lebak, Pandelang dan Kabupaten Serang terdampak pembangunan Tol Serang-Panimbang. Rinciannya, Kabupaten Lebak 40 bidang, Pandelang 21 bidang dan Kabupaten Serang 13 bidang.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan, pihaknya turut berperan aktif dalam pengadaan lahan pembangunan Tol Serang-Panimbang. Progres pengadaan lahannya sendiri diklaim sudah mencapai 99 persen. Selain tanah warga, pengadaan



Andi Tenri Abeng

tersebut juga dilakukan di tanah wakaf.

● Bersambung ke halaman 12

● Puluhan Tanah Wakaf (Sambungan dari halaman 1)

"Jumlah bidangnya bervariasi. Jumlahnya cukup banyak," katanya, kemarin.

Tanah wakaf yang terdampak pengadaan mendapat ganti rugi berupa lahan pengganti. Kemungkinan besar gantinya lebih luas dari jumlah tanah wakaf yang dibebaskan. "Untuk (lahan) wakaf (pemerintah) diwajibkan mencari tanah pengganti, sudah ada dan sudah diukur. Yang jelas (tanah pengganti) lebih luas pastinya," ujarnya.

Kepala BPN Kabupaten Pandelang Agus Sutrisno mengatakan, pengadaan lahan Tol Serang-Panimbang yang belum selesai salah satunya lahan milik TNI. "Sampai sekarang belum selesai. Sebenarnya sudah selesai, tinggal menunggu penghapusan (aset) dari

Menteri Keuangan. (Lokasinya) di daerah ujung Tol Serpan, di (Kecamatan) Panimbang," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Banten Nana Suryana menuturkan, secara umum PSN di Banten sudah mengalami progres yang cukup baik dengan capaian yang beragam. Beberapa di antaranya ada sudah sesuai target dan ada juga yang belum. "Kendalanya berbeda, tetapi pada umumnya memang ya di pengadaan lahan, ada memang masyarakat yang merasa keberatan atas uang ganti rugi, nah itu sudah ada wadahnya, sudah ada ketentuannya," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang keberatan terhadap ganti rugi lahan dan mengajukan

ke pengadilan. Keputusannya akan ditentukan oleh pengadilan itu sendiri. "Apakah keberatan masyarakat itu dipenuhi atau tidak. Jadi pada prinsipnya proyek ini tetap berjalan kalau PSN," ujarnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, kendala terbesar dari pembangunan berbasis infrastruktur pada saat ini adalah bidang pertanahan. Oleh karena itu, pihaknya berharap untuk tidak lagi dijadikan hambatan ke depannya. "Memang saat ini hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur ialah di bidang pertanahan. Ke depan juga saya harap dalam penetapan lokasi jangan ditunda-tunda meminta perpanjangan waktu dengan alasan yang tidak profesional," katanya. (H-51)***